

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PAKISTAN

Muslem

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: muslemjulok@yahoo.com

Abstrak

Islamic Republic of Pakistan sebagai sebuah Negara yang merdeka merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang. Negara ini memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dan lebih khususnya Pakistan dengan konstitusi 1973-nya menjadikan Islam sebagai *way of life*. Maka, menelaah bagaimana kebijakan penyelenggaraan PAI di Pakistan adalah bagian penting sebagai sebuah konsep kebijakan pendidikan Islam. Penyelenggaraan PAI (Islamiat atau *Islamic Study* istilah di Pakistan) merupakan pendidikan wajib mulai dari kelas III jenjang sekolah dasar sampai dengan menengah atas. Dilihat dari sisi muatan kurikulumnya terdapat kesamaan dengan muatan PAI di Indonesia. Bahkan, lebih luas kurikulum PAI di Pakistan terdapat muatan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian, dilihat dari kelembagaannya, terdapat tiga kategori di sana, yaitu: (1) *Quranic School*, (2) *Mosque Primary School*, dan (3) *Madrasah*.

Kata kunci: penyelenggaraan; PAI; Pakistan;

A. Pendahuluan

Pada tahun 1947 Negara Republik Islam Pakistan (*Islamic Republic of Pakistan*) muncul sebagai Negara yang merdeka dari pembagian wilayah kekuasaan Inggris atas India. Mayoritas penduduk Pakistan (97%) adalah Muslim¹ dan memiliki sistem pemerintahan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis (Konstitusi 1973 Republik Islam Pakistan). Dengan konstitusi ini, negara Pakistan menjadi lebih mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan yang berbasiskan Islam. Namun apakah konstitusi islami akan merepresentasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Pakistan?

Artikel ini akan mengulas praktik penyelenggaraan pendidikan di negara Pakistan dengan penjelasan yang singkat namun sistematis. Profil yang akan ditelaah mulai dari sejarah terbentuknya RIP (Republik Islam Pakistan), geografis dan demografis, sistem pemerintahan serta kebijakan penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam.

¹ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

B. Pembahasan

1. Profil Negara Republik Islam Pakistan (RIP)

a. Sejarah Singkat Terbentunya RIP

Pada abad ke-16 masa dinasti Mughal menguasai seluruh wilayah anak benua India dengan rajanya yang pertama bernama Babur, yang merupakan keturunan dari Timur Lenk (1530 M). Hanya saja kejayaan dinasti Mughal hancur bersamaan dengan masuknya Inggris di India. Singkatnya, pada tahun 1757, Serikat Dagang Hindia Timur Inggris menaklukkan dinasti Mughal. Serikat Dagang ini menguasai sebagian besar anak benua India. Tahun 1858 pemerintah Inggris mengambil alih tanggung jawab pemerintahan menyusul pemberontakan tentara asli India yang direkrut pasukan Bengal.²

Nasionalisme Pakistan berawal ketika terjadinya pertentangan antara Hindu dan Islam (persoalan Agama). Pertentangan ini terjadi karena umat Islam merasa bahwa mereka diabaikan oleh Kongres Nasional India Bersatu tahun 1885 yang didominasi oleh orang-orang Hindu di dalamnya. Setelah perang dunia I, pihak Islam mulai membuat suatu gerakan dengan membangun konsolidasi internal dalam rangka melepaskan diri dari India, yakni menuntut kemerdekaan.³ Sebagai langkah konkritnya, pada tahun 1857 Syed Ahmed Khan (1817-1898) mendirikan gerakan Aligarh, dengan tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan kaum Muslim. Namun gerakan ini tidak bertahan lama dan pada akhirnya bubar, serta Inggris kemudian berhasil memperlemah dan menekan kaum Muslim.

Kemudian, beberapa sarjana Muslim India yang pernah belajar di Barat telah mendirikan sebuah organisasi politik yang disebut Liga Muslim India (*India Muslim League*) di Dhaka pada 1906. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim India di bidang keagamaan, budaya, politik dan ekonomi. Pada saat yang sama, tokoh Hindu ekstrem membangun gerakan *Shuddi* dan *Sangathan* berupaya menghindukan umat Islam secara paksa.

Langkah konkrit selanjutnya, dilakukan oleh seorang penyair dan filsuf besar Islam Muhammad Iqbal pada tahun 1930. Ia mengusulkan untuk membentuk negara

² Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 199.

³ B. Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. XII, Cet. I (Jakarta: Cipta AdiPustaka, 1990), hal. 40.

terpisah di sub-kontinen yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Usul tersebut didukung oleh Muhammad Ali Jinnah (seorang pengacara berpendidikan Inggris). Selanjutnya, ketika Liga Muslim dipimpin Muhammad Ali Jinnah, organisasi ini mengusulkan dibentuknya sebuah negara Muslim yang terpisah dari India di daerah Barat Laut dan Timur Laut India yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara inilah yang pada akhirnya disebut Pakistan.⁴

Rencana pembentukan negara Islam merdeka yang lepas dari India, mendapat kecaman keras dari *Jami'at al-Ulama* (Perkumpulan Ulama-ulama India). Menurut mereka, pembentukan negara Pakistan yang terpisah dari India tidak akan menyelesaikan permasalahan. Alasan tersebut didasarkan pada fakta bahwa di India terdapat banyak umat Islam yang telah lama hidup berdampingan dengan baik. Kaum agama tersebut melakukan persekutuan dengan para tuan tanah. Di bawah pemerintahan Inggris mereka dikukuhkan atas hak kepemilikan tanah mereka, melindungi dari persaingan kepentingan finansial dengan pihak Hindu, bahkan beberapa tanah tambahan diberikan kepada mereka.

Dalam sejarah perkembangan negara Pakistan, terjadi konflik kepentingan serta perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan konflik internal berkepanjangan antara penduduk yang beragama Islam dan Hindu-Budha. Hal ini menyebabkan pertumpahan darah yang sulit untuk dihindari oleh kedua kelompok tersebut.⁵ Pada tahun 1940 Liga Muslim, mendesak para pemuka agama bahwa apapun kepentingan lokal mereka, sebuah negara Islam yang dijalankan oleh Muslim untuk mempertahankan prinsip-prinsip pola kehidupan muslim, yang mutlak diperlukan.

Dalam rapat tahunan Liga Muslim pada tahun 1940, kaum menyetujui pembentukan negara, dengan nama Pakistan.⁶ Dengan dasar persetujuan yang jelas ini,

⁴Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Peradaban Islam di India-Pakistan*, Jurnal: Al MURABBI, Vo. 01, No. 02, (Ngawi: STIT Islamiyah, 2014), hal. 4. Lihat juga: Ahmad, Mumtaz. "Pakistan" dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. (New York: Oxford University Press, 1993), hal. 287)

⁵ Aisyah, *Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan*, Jurnal Politik Profetik, Vo. 4, No. 2, (Makassar: UIN Alauddin, 2014), hal. 80.

⁶Tentang nama Pakistan menurut salah satu sumber berasal dari seorang mahasiswa India di London bernama Khaidri Rahmat Ali, ia sangat tertarik dengan pidato Iqbal mengenai konsep negara muslim. Ia mengumpulkan huruf awal dari lima wilayah yaitu "P" diambil dari Punjab, "A" dari Afghanistan, "K" dari Khasmir, "S" dari Shindi, "Tan" dari Baluchistan. Sumber lain menyatakan bahwa Pakistan berasal dari kata Persi yaitu "Pak" berarti suci, dan "Stan" berarti negara, jadi Pakistan berarti

Liga Muslim mendapat dukungan yang luar biasa dari umat Islam dan kedudukannya semakin bertambah kuat. Adapun sebaliknya, tokoh-tokoh Muslim yang bernaung di bawah partai Kongres Nasional India kehilangan pengaruhnya, bahkan sebagian mereka meninggalkan partai Kongres tersebut dan kemudian bergabung dengan Liga Muslim. Dengan demikian Ali Jinnah dan Liga Muslim semakin bertambah kuat, hal ini terlihat dari hasil perolehan suara terbanyak di beberapa daerah dalam pemilihan tahun 1946.

Sebelumnya, Inggris pada tahun 1945 mulai membicarakan kemerdekaan India, namun selalu mengalami kegagalan. Pada akhirnya Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang ditentukan oleh Inggris. Usaha ini ditentang oleh Ali Jinnah, karena penyusunan pemerintahan sementara dilakukan dengan sepihak, sehingga menimbulkan keributan. Menurut Ali Jinnah, dengan melihat situasi seperti ini tidak mungkin diadakan sidang Dewan Konstitusi pada bulan Desember 1946. Setahun kemudian keluarlah putusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi, dan keesokan harinya tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara berdaulat bagi umat Islam. Ali Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jendral dan mendapat gelar *Qaizi 'Azam* (pemimpin besar)⁷ dari rakyat Pakistan.

b. Geografis dan Demografi RIP

Adapun secara geografis luas wilayah Pakistan 803.940 Km², yang terdiri dari 4 (empat) provinsi, yaitu: (1) Balochistan: 347.190 km², (2) Punjab: 205,344 km², (3) Sindh: 140,914 km², (4) North West Frontier Province (NWFP): 74,521 km²; dan Islamabad: 906km² sebagai ibu kota Negara. Wilayah Pakistan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Uni Soviet
- Sebelah Barat : Iran
- Sebelah Barat Laut : Afghanistan,
- Sebelah Timur Laut : Cina dan India.

negara suci. Lihat: Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 194.

⁷ Pakistan masih menggunakan sebutan Gubernur Jenderal untuk Kepala Negara sampai tahun 1956 sesuai dengan *British Indian Act* 1935. Setelah memiliki Konstitusi sendiri tahun 1956, Pakistan menggunakan sebutan Presiden sebagai Kepala Negara.

Jumlah penduduk Negara Pakistan, 201.995.540 jiwa dengan luas wilayah: 796.095 km². Rasionya dari jumlah penduduk dunia: 2,7%.⁸ Minoritas non-muslim di negara Pakistan adalah umat Kristen, Hindu dan Persi. Di antara Muslim 10% sampai 15% adalah Syiah Istna ‘Asya’ariyah. Persentasi yang menarik, dimana Pakistan menunjukkan dirinya sebagai negara terbesar kedua di dunia jumlah Muslim setelah Indonesia,⁹ dan Pakistan memiliki latar belakang etnis suku yang cukup beragam juga, yakni Punjabi (mayoritas), Shindhi, Pathan, Baluch dan etnis India. Menarik untuk disebutkan di sini, meskipun persentase Syiah tergolong besar di Pakistan, namun selama ini Sunni-Syiah tidak ada konflik parah melanda negeri ini berdasarkan perbedaan sekte ini.

Bahasa persatuan Pakistan adalah bahasa Urdu, sedangkan bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang berlaku di Pakistan. Untuk produk utama negara di bidang perindustrian, berupa tekstil, produk makanan, rokok, kimia, karpet, kerajinan kulit dan petrokimia. Selain itu berupa pertambangan seperti gas alam, minyak bumi, biji besi dan pertanian berupa kapas, beras dan gandum.

c. Sistem Pemerintahan Pakistan

Secara konstitusi, sistem pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer. Namun, sejak Jenderal Pervez Musharraf mengambil alih jabatan Presiden melalui suatu kudeta tak berdarah pada bulan Oktober 1999, sistem parlementer tersebut pada kenyataannya mengarah pada sistem presidensiil,¹⁰ dimana kekuasaan seorang Presiden secara “*de-facto*” lebih besar daripada Perdana Menteri.

Penerapan sistem presidensiil tersebut, didasarkan atas UUD 1962 yang berlaku sampai tahun 1969. Menurut UUD tersebut, badan eksekutif terdiri dari presiden yang beragama Islam beserta menteri-menteri. Para menteri adalah pembantu Presiden yang

⁸ <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>. Diakses tanggal 15 Maret 2019.

⁹ <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>. (akses tanggal 11 Maret 2019).

¹⁰ Sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden (yang merupakan kekuasaan nominal) dan memegang kekuasaan politik. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Presiden dipilih bukan oleh parlemen, tetapi dipilih secara langsung oleh pemilih (rakyat), presiden bukan merupakan bagian parlemen, dia tidak dapat diberhentikan dari jabatannya oleh parlemen, dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum. Namun apabila presiden membubarkan badan legislatif, presiden juga harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru.

tidak boleh merangkap anggota legislatif. Selanjutnya, presiden mempunyai wewenang untuk menjatuhkan veto atas rancangan UU yang telah diterima oleh badan legislatif. Namun veto dapat dibatalkan, jika rancangan UU tersebut diterima oleh mayoritas 2/3 suara. Kemudian, setiap provinsi mempunyai sistem pemerintahan yang sama, dan setiap provinsi mempunyai kepala pemerintahan masing masing yang dapat dipilih secara langsung dalam sebuah rapat propinsi dan nantinya dapat menjadi perdana menteri. Pemerintah pada setiap provinsi ditetapkan oleh Presiden.

Sejak berdirinya Pakistan sebagai sebuah negara, umat Islam mencoba menerapkan konsep Islam tentang sebuah negara. Mereka memasuki masa pencarian konsep yang terus menerustentang apa sebenarnya negara Islam itu. Persoalan itu merupakan bahan polemikyang berkepanjangan di kalangan tokoh-tokoh Islam, baik yang berpendidikan Barat maupun ulama.¹¹ Sistem pemerintahan diajukan oleh Majelis Nasional dengan berpedoman kepada Rancangan Undang-Undang hasil sidang Liga Muslim pada bulan Maret 1940,yaitu harus sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu, dikeluarkan keputusan yang berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan undang-undang tersebut yang antara lain memuat prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak kebebasan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis. Sistem pemerintahan yang dirumuskan Liga Muslim tahun 1940 itu disahkan menjadi konstitusi tahun 1956. Dalam konstitusi itu negara bernama Republik Islam Pakistan (*Islamic Republic of Pakistan*).

Konsekuensinya Negara Pakistan mengalami kesulitan dalam mendefinisikan keislamannya. Perdebatan-perdebatan dalam majelis Konstituante, demikian pula hasil-hasil kompromi antara kubu tradisional dan modernis,¹² yang terjelma dalam

¹¹ Fazlur Rahman Malik seorang pemikir Islam, Sayyid Abul A'la Maududi jurnalis, teolog, dan filsuf politik Pakistan Sunni, dan mayor pemikir Islam Ortodoks. Maulana Abdul Rashid Ghazi adalah fundamentalis Pakistan, yang menantang Pakistan untuk menerapkan hukum Islam. Muhammad Abdus Salam ahli bidang fisika (nobel bidang fisika 1979). Muhammad Asad atau Leopold Weiss adalah seorang cendekiawan muslim, mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur'an modern yakni *The Message of the Qur'an*.

¹²Kaum modernis sulit memutuskan kaitannya dengan masa lampau dalam menerima nilai-nilai modern. Sementara kaum tradisional juga menemui kesulitan membebaskan diri secara total dari masa kini dan mencari perlindungan yang aman di masa lampau. Kaum modernis menuduh kaum tradisional menyembah sejarah bukan Tuhan, lantaran kecenderungan mereka dalam menghidupkan masa silam. Sebaliknya kalangan tradisional menuduh kubu modernis memiliki keyakinan buruk karena memandang defenisi mekanis syariat Islam dalam term-term Barat modern adalah yang terbaik, dan menolak keberatan terhadap otoritas masa lampau yang tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya adalah kekacauan

konstitusi tahun 1956, dalam konstitusi ini negara bernama “Republik Islam Pakistan” amandemen-amandemennya tidak memuaskan semua pihak.

Pada tahun 1962 konstitusi tahun 1956 ini kemudian ditinjau kembali yang antara lain menghilangkan kata “Islam” dari konstitusi tersebut, dan sebagai imbangannya didirikan dua lembaga, yakni Dewan penasehat Ideologi Islam dan Lembaga Penelitian Islam. Tujuan dari Lembaga Penelitian ini adalah untuk memberikan pendefinisian terhadap hal-hal yang pokok dalam Islam dengan cara yang rasional dan liberal sehingga dapat melahirkan watak yang dinamis dalam hubungannya dengan kemajuan intelektual dan ilmiah yang terdapat di dunia modern.¹³

Ketika sampai kepada persoalan hukum Islam, kesulitan yang sama juga dihadapi kaum Muslim Pakistan terutama oleh Lembaga Penelitian Islam Pakistan dan Dewan Penasehat Ideologi Pakistan itu sendiri. Dalam pemahaman kaum modernis, hukum Islam bisa diterapkan jika dimodernisasi selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Sementara kaum tradisional sebaliknya menuntut bahwa fiqih yang dihasilkan para mujtahid lewat deduksi dan derivasi dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi, harus diberlakukan tanpa kecuali. Kontroversi tentang riba dan bunga bank, pendayagunaan zakat, program keluarga berencana, hukum kekeluargaan Islam dan lainnya merupakan cerminan betapa sulitnya kaum muslim Pakistan mendefinisikan syariat Islam untuk konteks negeri mereka.¹⁴

dan kekacauan dalam definisi Islam yang menyertai pengalaman kenegaraan Pakistan. Kompromi-kompromi yang dicapai tentu saja tidak selaras dengan modernisasi yang dikehendaki kubu modernis ataupun status quo yang hendak dipertahankan oleh kelompok tradisional. Ajang kontroversi akhirnya melebar kepada aksi-aksi antara lain penjarahan, pembakaran, terorisme dan pembunuhan. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Muhammad Ayub Khan. Lihat: Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hal. 228.

¹³ John L. Esposito, *Islam And Development Religion and Sosiopolitical Change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 224.

¹⁴Sebut saja misalnya, dalam kasus program keluarga berencana, misalnya kelompok modernis mendukung gagasan kontrol penduduk untuk negara Pakistan yang memiliki populasi dan angka kelahiran tinggi. Lembaga Riset Islam yang didirikan oleh Zia Ul-Haq menerjemahkan fatwa Mahmud Syaltut, Syaikh al-Azhar yang mendukung program tersebut. Tetapi kelompok tradisional menegaskan bahwa Islam tidak mendukung gagasan kontrol penduduk. Penggunaan alat-alat kontrasepsi menurut mereka akan mengarah kepada indiskriminasi hubungan seksual. Bahkan dalam sebuah konferensi ulama, dinyatakan bahwa Firaun telah membunuh anak laki-laki Bani Israil, sementara orang-orang Pagan telah membunuh anak-anak wanitanya, maka pemerintah Pakistan lebih buruk lagi, lewat program keluarga berencana mereka telah membunuh baik anak laki-laki maupun perempuan. Lihat: Taufik Adnan Amal, “Pelajaran Berharga dari Pakistan”. Lihat: [http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran berharga dari Pakistan](http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran%20berharga%20dari%20Pakistan). Diakses dari Islamliberal.com, pada tanggal 12 Maret 2019.

2. Sistem Pendidikan di RIP

a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum (Jenis, Jalur dan Jenjang)

Sampailah pada pembahasan sistem penyelenggaraan pendidikan di Pakistan. Penyelenggaraan pendidikan di Pakistan diawasi oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Pakistan serta pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah federal sebagian besar membantu dalam pengembangan kurikulum, akreditasi dan dalam pembiayaan penelitian dan pengembangan. Ini dilakukan untuk mewujudkan Pasal 25-A Konstitusi Pakistan, yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak dari kelompok usia 5 sampai 16 tahun (11 Tahun). Dimana bunyinya bawah “Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum.”

Konstitusi tersebut menjadi perhatian Pemerintah, meskipun pada realitasnya, kondisi pertumbuhan ekonomi Pakistan masih rendah (dibandingkan dengan Bangladesh), angka kemiskinan yaitu 31% di bawah garis kemiskinan, sedangkan Bangladesh 29% (Bank Dunia). Begitu juga dengan kondisi tingkat melek huruf orang dewasa di Pakistan yaitu sekitar 41%. Diperburuk dengan kondisi melek huruf wanita yang hanya sebesar 29%, dan di beberapa kawasan di Pakistan seperti Baluchistan dan propinsi di Perbatasan Barat Laut, tingkat melek huruf wanita hanya 3%. Dilemanya lagi, dana pendidikan publik yang dikeluarkan, kurang dari 2% untuk sektor pendidikan.¹⁵

Sama halnya dengan penjelasan dari Surawardi, bahwa belanja pendidikan sebagai persentase dari PDB (Produk Domestik Bruto). Pengeluaran pemerintah Pakistan untuk pendidikan terletak di pinggiran 2% dari PDB. Namun, pada 2009 pemerintah menyetujui kebijakan pendidikan nasional yang baru, dengan menetapkan penganggaran dana pendidikan akan meningkat menjadi 7% dari PDB, sebuah ide yang pertama kali diusulkan oleh pemerintah Punjab.¹⁶

Adapun, sistem standar nasional pendidikan terinspirasi dari sistem Inggris. Pendidikan pra-sekolah dirancang untuk berusia 3-5 tahun dan biasanya terdiri dari tiga tahap, yaitu Kelompok Bermain, Taman Kanak dan TK (juga disebut “KG” atau

¹⁵Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development Ekonomi Pembangunan*, Terj. Haris Munandar dan Puji A.L., (Jakarta Erlangga, 2006), hal. 104.

¹⁶ Surawardi, *Pendidikan Islam di Pakistan*, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, (Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015), hal. 44-45.

“Prep”). Setelah pendidikan pra-sekolah, siswa melalui *primary*/primer (SD) dari kelas I sampai V. Hal ini didahului dengan sekolah *middle*/ menengah (SMP) dari kelas VI sampai VIII. Di jenjang *middle*/ menengah, pendidikan seks masuk dalam kurikulum pendidikan pemerintah. Kurikulum biasanya tunduk pada institusi tersebut. Delapan disiplin ilmu yang diajarkan pada sekolah formal yakni: Urdu, bahasa Inggris, matematika, seni, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, Islamiyat, dan terkadang studi komputer (tergantung ketersediaan laboratorium komputer). Kemudian, jenjang *high*/ menengah atas (SMA) IX-X. Berikut penulis rangkum dalam bentuk tabel tentang penyelenggaraan pendidikan di Pakistan dilihat dari jalur pendidikan formal, yaitu:

Tabel 1: Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Formal ¹⁷	Jenjang Kelas	Kurikulum	Kurikulum Wajib
<i>Primary</i> /primer	I-V (5 Tahun)	Bahasa Urdu, Inggris, matematika, seni, ilmu Pengetahuan alam, ilmu sosial, Islamiyat dan terkadang studi computer (tergantung ketersediaan laboratorium)	Bahasa Inggris, Urdu, Islamiyat (Studi Keislaman)
<i>Middle</i> /tengah	VI-VIII (3 Tahun)		
<i>High</i> / menengah: jenjang ini ada 3 jenis sekolah, yaitu: 1. Sekolah yang bersifat umum (<i>general</i>) mempersiapkan untuk pendidikan perguruan tinggi 2. Sekolah kejuruan (<i>vocational</i>) 3. Sekolah teknik	IX-X (2 Tahun) • Sekolah Kejuruan (<i>vocational</i>) dan Teknik ini program 3 Tahun (Gelar Diploma). • Jurusan: Sipil, Kimia, Arsitektur, Teknik, Listrik, Elektronika, Ilmu Komputer dan masih banyak lagi teknologi.	• Sekolah Kejuruan dan Teknik: adaah proses menggabungkan: Fisika, Kimia, Islamiyat (Studi Keislaman), dan Studi Pakistan.	Islamiyat (Studi Keislaman), dan Studi Pakistan tetap menjadi kurikulum wajib
<i>High secondary Intermediate Colleges</i> (Sekolah persiapan) untuk Perguruan Tinggi	XI-XII (2 Tahun)		Bahasa Inggris, Urdu, Islamiyat dan Studi Pakistan tetap menjadi

¹⁷ Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 58-59. Lihat juga: Surawardi, *Pendidikan Islam di Pakistan*, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, (Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015), hal. 44-45.

Jenjang Pendidikan Formal ¹⁷	Jenjang Kelas	Kurikulum	Kurikulum Wajib
			kurikulum wajib.
Sarjana	XIV / XV (3-4Tahun)		
Master	XVI-XVII (2 Tahun)		Studi Pakistan
Ph.D	XVIII (3 Tahun)		
Total lamanya waktu untuk menumpuh sampai jenjang Doktor.	20-21 Tahun		

Bahasa provinsi dan regional seperti Punjabi, Sindhi, Pashto dan lain-lain dapat diajarkan di masing-masing provinsi, khususnya di sekolah-sekolah bahasa menengah (SMA). Beberapa lembaga memberikan instruksi dalam bahasa asing seperti Turki, Arab, Persia, Perancis dan Cina. Bahasa pengantar tergantung pada sifat dari lembaga itu sendiri, apakah itu sebuah sekolah Inggris menengah atau sekolah menengah Urdu.

Ada dua jenis program Sarjana di Pakistan: *Pass* dan *Honours*. Lulus gelar membutuhkan dua tahun studi dan mahasiswa biasanya membaca tiga mata pelajaran opsional (seperti Kimia atau Ekonomi) di samping jumlah yang hampir sama dari mata kuliah wajib (seperti Studi Pakistan dan Inggris). Gelar *Honours* membutuhkan tiga atau empat tahun studi, dan mahasiswa biasanya mengkhususkan diri dalam bidang studi pilihan, seperti Biochemistry (BSc Hons. Biokimia). Hal ini dapat dicatat bahwa Lulus Sarjana sekarang perlahan-lahan sedang dihapus untuk *honours* di seluruh negeri.

Sebagian besar program gelar Master memerlukan pendidikan dua tahun. Master of Philosophy (M.Phil) tersedia di sebagian besar mata pelajaran dan dapat dilakukan setelah melakukan *Masters*. *Doctor of Philosophy* (PhD) tersedia di area tertentu setelah mendapatkan gelar M.Phil. Mahasiswa mengejar gelar PhD atau M.Phil harus memilih bidang tertentu dan universitas yang melakukan riset di bidang tersebut. M.Phil dan pendidikan PhD di Pakistan membutuhkan minimal dua tahun studi.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam

Pada masa penjajahan Inggris, penyelenggaraan subjek formal Islamiyat (Pendidikan Agama Islam) bagi siswa Muslim di anak benua India ini tidak diberikan. Sehingga, proses pembelajaran untuk muatan keislaman (pendidikan agama Islam) mutlak menjadi tanggung jawab keluarga. Meskipun tidak dipungkiri, di beberapa

wilayah, Madrasah sangat berperan dalam membantu anak-anak untuk membaca al-Quran, pembentukan karakter dianggap tanggung jawab keluarga.

Pascakemerdekaan Pakistan pada tahun 1947 dan kemudian diadopsi dari resolusi tujuan pada tahun 1949, pelajaran Islamiyat secara resmi diperkenalkan. Menteri pertama pendidikan Pakistan saat itu Fazlur Rahman, seorang sarjana Islam, dimana ia menganggap bahwa Islamiyat sebagai subjek penting dalam seluruh skema pendidikan holistik.¹⁸

Sistem pendidikan Nasional Pakistan, dirumuskan untuk membentuk kesatuan nasional Pakistan berdasarkan Islam. Oleh karenanya, setiap keputusan dan kebijakan pendidikan selalu menekankan bahwa sistem pendidikan nasional menekankan pada sistem pendidikan terpadu.¹⁹ Islamiyat atau Studi keislaman²⁰ menjadi pelajaran wajib atau pokok bagi semua pelajar Muslim mulai, hanya saja secara mata pelajaran Islamiyat baru diwajibkan mulai dari kelas III sampai kelas XII, sebagaimana termuat dalam dokumen kebijakan pendidikan nasional 2017-2025, bahwa: “*Islamiyat will be*

¹⁸Amin Valliani, *Teaching Islamiyat*, akses <http://www.dawn.com>, pada tanggal 23 Maret 2019. Lebih lanjut menurut Ida Mustofa, para pelajar di lembaga pendidikan Islam tradisional (*maktab, madrasah, Darul Ulum*) diberikan bantuan keuangan: Lihat: Ida Mustofa, *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal: Urwatul Wutsqo, Vol. 4, No.2 (Nganjuk: STAI Darussalam, 2015), hal. 12.

¹⁹ Kebijakan Pendidikan Nasional 1998-2010 yang sedang dijalankan untuk menekankan pada pengembangan sistem pendidikan terpadu, dimana nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip dan tujuan tercermin dalam silabus dari semua disiplin ilmu pada umumnya dan Studi Islam, khususnya. Lihat: Ministry of Education Government of Pakistan: *National Education Policy 2009*.

²⁰ Muatan dalam Islamiyat mengandung: (1) al-Quran dan Hadis: Membaca al-Qura'an, menghafal Sura pendek yang dipilih dari Qura'an Kudus (Hifz), menghafal dan terjemahan dipilih Surah Pendek, dan begitu juga dengan Hadith Rasulullah Saw., (2) Aqidah dan Ibadah (Fiqh): Rukun Islam dan Rukun Iman, termasuk Risalah Kenabian, Doa, Puasa, Zakat, Haji, Jihad dan pentingnya mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari; dan Hak Allah dan Hak Manusia. (3) Sejarah Islam: Biografi Nabi Muhammad Saw, dari lahir sampai wafatnya sebagai tauladan dalam hidup untuk menekankan pada karakter moral tertinggi Nabi Saw yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dengan Muslim, non-Muslim dan makhluk hidup lainnya serta kepemimpinan Nabi Saw yang patut dicontoh, toleransi dan keadilan. (4) Akhlak: Hak dan kewajiban orang tua, kerabat, tetangga, guru, teman, sahabat, anak-anak, perempuan, anak-anak yatim, janda, pasien, cacat, orang tua, wisatawan, tamu, nonMuslims dan sesama manusia lainnya; toleransi, pengampunan, kesabaran, kejujuran, kesalehan, kesucian, pencerahan, pelayanan kepada umat manusia, ketepatan waktu, kesederhanaan, cinta untuk negara dan bangsanya, persaudaraan Islam, kebenaran, martabat tenaga kerja, kesetaraan, komitmen untuk berjanji, 'halal' laba, disiplin, menghormati hukum, nity nasional, dan bersuci (Taharah), kebersihan dan lingkungan yang bersih, kontrol pada extravaganza dan polusi, perawatan untuk tubuh dan jiwa dalam perspektif ajaran Islam. (5) Akhlak Terpuji: kepribadian yang menonjol dari Islam yaitu Nabi Muhammad Saw, para sahabat Nabi Saw, tasawuf, reformis, filsuf, ilmuwan dan prajurit / jenderal sebagai panutan bagi generasi muda untuk mengikutinya. Lihat: Ministry of Education Government of Pakistan: *National Education Policy 2009*.

introduced as compulsory subject from class III to Intermediate classes extending up to graduation in all general and professional institutions as in the past”.²¹

Meskipun demikian, Islamiyat untuk kelas I dan II atau Pendidikan Anak Usia Dini, sudah dintegrasikan dalam mata pelajaran Urdu, dimana penjelasannya: “*for Early Childhood Education (ECE) and classes I to II, it will be integrated in other subjects, including Urdu text book.*”, sehingga secara umum, kebijakan pendidikan agama Islam atau Islmiyat sudah dimulai dari sekolah dasar sampai kelas menengah Atas, bahkan dari pendidikan usia dini, sebagaimana termaktub dalam kebijakan: “*Islamiyat shall be taught as a compulsory subject from Grade I to Grade XII, extending up to graduation level in all general and professional institutions*”.²² Dalam hal PAI (Pendidikan Agama Islam atau Islamiyat) di Pakistan masuk di dalamnya pelajaran bahasa Arab, maksudnya materi dari pelajara Islamiyat tersebut berbahasa Arab dan Urdu dengan serapan abjad Arab.²³ Kemudian, pada perguruan tinggi, Islamiyat diberikan untuk memahami islam secara rasional. Di samping, Komisi Pendidikan Nasional juga membentuk Lembaga Penelitian Islam yang bertujuan untuk memadukan nilai-nilai fundamental Islam dengan sains modern.²⁴

Bagaimana untuk peserta didik yang non-Muslim, dari kebijakan kementerian pendidikan nasional Pakistan menjelaskan bahwa “*Non-Muslim students will be offered Ethics (Moral Education) in lieu of Islamiyat compulsory from Classes III to XII and they will not be required to read lessons on Islam in ECE and I to II classes*”. Jadi, mereka akan diberikan pendidikan moral sebagai pengganti untuk Islamiyat.

Adapun tujuan dari pelajaran Islamiyat atau PAI tersebut adalah memastikan bahwa semua anak-anak Muslim yang ada untuk belajar memahami memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan mereka dengan tujuan reformasi dan perkembangan masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah.

Lebih lanjut, proses pembelajarannya menekankan pada pengembangan sistem pendidikan terpadu, dimana nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip dan tujuan tercermin dalam

²¹ Ministry of Education Government of Pakistan, *National Education Policy 2017-2025*.

²² Ministry of Education Government of Pakistan, *National ...*

²³ Dapat diakses di <http://unesco.org.pk/education/teachereducation/lessonplan.html>.

²⁴ Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan ...*, hal. 59.

silabus dari semua disiplin ilmu pada umumnya dan Studi Islam, khususnya. Poin pentingnya termaktub dalam *Ministry of Education Government of Pakistan*, bahwa: *The National Education Policy 1998-2010 currently under implementation stresses upon the development of an integrated educational system in which Islamic values, principles and objectives are reflected in syllabi of all the disciplines, in general and Islamic Studies, in particular.*²⁵

Upaya mencapai tujuan tersebut, maka para guru studi keislaman harus dipersiapkan dan memiliki pandangan yang objektif dan memahami jiwa dan metode ilmu pengetahuan modern, baik ilmu kealaman maupun ilmu sosial serta mampu menerapkannya dan menginterpretasikan Islam. Diharapkan dengan demikian, semua guru disamping harus menguasai tentang Islam dari berbagai seginya, ia juga harus mampu menguasai paling tidak satu cabang ilmu pengetahuan bagik dari sosial, ekonomi, sosiologi, psikologi, politik.²⁶

c. Lembaga Pendidikan Islam

Penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan Islam Pakistan terbagi kepada tiga kategori: (1) *Quranic School*, (2) *Mosque Primary School*, dan (3) *Madrasah*. *Pertama* adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-quran (baca: belajar iqra'). Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla di desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas. Ada yang pagi, siang, dan sore. Guru yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut juga. *Kedua*, sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Inisiatif ini resmi dilakukan oleh pemerintah *Zia-ul Haq* pada tahun 80-an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan disebagian tempat di Pakistan.

Selain belajar al-Quran mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa Urdu dan matematika. Hanya saja, pendidikan ini sering terkendala disebabkan para imam jarang yang menguasai bahasa urdu dan matematika dengan baik, yang akhirnya kebanyakan sekolah akhirnya gulung tikar. Sekarang jumlah *Mosque Primary School* di seluruh Pakistan kurang lebih 25.000 buah. Dan yang terakhir (ketiga) adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia para santri tidak diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an

²⁵ Ministry of Education Government of Pakistan: *National Education Policy 2009*.

²⁶ Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan ...*, hal. 59.

seluruhnya, kecuali pesantren tersebut pesantren hifz al-Qur'an. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan kepada murid-muridnya untuk menghafal al-Qur'an 30 juz sebelum belajar materi-materi lain. Karena al-Qur'an merupakan asas bagi pelajar yang ingin mendalami ilmu agama.²⁷

Berbicara tentang madrasah di Pakistan, banyak anggapan yang mengkaitakan antara madrasah dengan serangan 11 september di USA pada tahun 2001. Oleh karena itu, upaya pemerintah Pakistan untuk mereformasi sistem madrasah tentu bertujuan merubah persepsi dunia saat ini tentang militan Pakistan.

Reformasi dilakukan dengan cara: (1) seluruh madrasah harus terdaftar di dewan madrasah propinsi, (2) melarang madrasah menerima bantuan terutama dari luar negeri, (3) kurikulum dikembangkan dengan corak modern yang mengajarkan pengetahuan umum, dan (4) madrasah dimasukkan sebagai bagian dari sistem integrasi pendidikan nasional dengan modernisasi kurikulum dan peningkatan kesejahteraan pelaku pendidikannya.²⁸

Bahkan dalam perjalanannya madrasah pernah dilabelkan sebagai lembaga teroris. Sejarah singkat krisis tersebut berawal ketika dua madrasah di Pakistan yaitu *Jamiah Hafsa* dan *Jamiah Faridia* mengumumkan penerapan syariat Islam di seluruh Pakistan. Tokoh utama madrasah itu adalah Maulana Abdul Rashid Ghazi. Mereka terdorong menerapkan syariat Islam, karena menganggap pemerintah Pakistan telah gagal mengatasi masalah pelacuran dan tindak kriminal lainnya. Persoalan ini mengemuka setelah para santri putri dari kedua madrasah itu menyandera tiga perempuan dan satu aki-laki pada tanggal 30 Maret 2007, karena mereka menduga sebagai pengelola tempat pelacuran di sebuah kawasan kalangan menengah di Islamabad.

Hubungan pihak pemerintah (Presiden Perves Musharraf) dengan Maulana Abdul Rashid Ghazi terus memburuk, sampai pada desakan agar Musharraf diadili di Pengadilan Syaria. Suasana semakin memburuk saat aparat pemerintah menghancurkan tujuh masjid dan madrasah dengan alasan ilegal pada tanggal 3 Juli 2007. Sebaliknya, para santri dan pengasuh menilai dirinya kini telah terhadapan

²⁷Surawardi, *Pendidikan Islam di Pakistan...*, hal. 46.

²⁸ Muhammad Nasir, *Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia*, Jurnal: Nadw, Vol. 9, Nomor 2, (Samarinda: IAIN Samarinda, 2015), hal. 160.

dengan pemerintah Pakistan dan wajib hukumnya melancarkan aksi perlawanan yang dinilainya sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar* dan berakhir dengan tewasnya Maulana Abdul Rashid Ghazi dan ibu kandungnya serta 160 santri. Serangan pasukan Pakistan terhadap masjid dan madrasah membuat Presiden Musharraf menghadapi instabilitas yang semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu, yang mendorong Presiden Musharraf menetapkan keadaan darurat pada tanggal 3 November 2007.²⁹

d. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Dalam pembahasan kurikulum pendidikan agama Islam ini, penulis tidak menjelaskan pemahaman kurikulum dalam artian lebih luas yaitu kurikulum sebagai sebuah proses, namun pembahasannya lebih kepada kurikulum dalam perspektif sempit yaitu kurikulum sebagai sebuah mata pelajaran atau materi, dan dalam pembahasan ini penulis akan mencoba mengkaji muatan materi dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di Negara Pakistan.³⁰ Pendidikan Agama Islam di Pakistan diistilahkan dengan Islamiyat atau Studi Keislaman (*Islamic Study*). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa: *The objectives of teaching of Islamiyat shall be to ensure that all Muslim children are provided opportunities to learn understand and apply the fundamental principles of Islam in their lives with the purpose of reformation and development of the society on the principles of the Qura'an and Sunnah.*

Artinya Islamiyat yang diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan mereka dengan maksud untuk mereformasi dan pengembangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah.

Maka dari itu, Islamiyat menjadi pelajaran wajib, sebagaimana termaktub dalam Ministry of Education Government of Pakistan, yaitu, "*Islamiyat shall be taught as a compulsory subject from Grade I to Grade XII, extending up to graduation level in all*

²⁹ Aisyah, *Nasionalisme dan Pembentukan ...*, hal. 88-89.

³⁰ Terdapat dua perspektif atau aliran yang berbeda dalam memberikan pengertian kurikulum. Yaitu (1) perspektif yang melihat kurikulum secara sempit atau tradisional. Dimana kurikulum dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran atau materi untuk diberikan kepada peserta didik, dan (2) perspektif yang melihat kurikulum secara lebih luas (modern), dimana kurikulum dipandang bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, melainkan juga hal-hal yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendidikan. Lihat: Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cet. Ke-7, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

general and professional institutions”.³¹ Dan secara mata pelajaran dilaksanakan mulai kelas III sampai kelas XII.³² *danfor Early Childhood Education (ECE) and classes I to II, it will be integrated in other subjects, including Urdu text book.*”

Lebih lanjut, terkait dengan muatan materi Islamiyat maka dalam tulisan ini, untuk melihat contoh muatan kurikulum Islamiyat yang pernah diberlakukan di Pakistan, maka penulis akan menelaah materi Islamiyat untuk jejang Sekolah Dasar dari kelas I sampai dengan kelas V dengan sumber kajian dari hasil penelitian UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) terhadap kurikulum dan buku ajar Sekolah Dasar di Pakistan pada tahun 1997.³³ Berikut penulis tuliskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2: Muatan Kurikulum Islamiyat

Kelas	Aspek Al-Qur'an	Aspek Aqidah dan Ibadah	Aspek Akhlak	Aspek Tarikh
I	- Menghafal abjad Arab (Hijayyah) - Menghafal nama Allah Maha Besar, Yang Maha Pemurah, Pemberian rahmat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya.	- Iman kepada Allah (Pencipta dan satu-satunya dan tidak pemisalan bagi-Nya. - Muhammad Saw adalah yang terakhir dan akhir Nabi Allah. - Al-Qur'an adalah Kitab terakhir dan akhir terungkap dari Allah. - Adab dan Taharat (wudhu) dan kebersihan tubuh dan pakaian.	- Akhlak dan Adab (Bangun pagi, membaca kalimah Tayyebah, Islam salam (Salaam), adab makan dan minum.	- Sejarah Nabi Muhammad (Nama Ayah dan yang menjaganya)
II	- Penggunaan tanda-tanda vokal (Harakat) dan pembacaan sederhana yang digabungkan. - Menghafal, tauz, QS al-Fatihah dan kalimat syahadah.	- Allah adalah satu. Dia tidak membutuhkan pada yang lain. Dia yang member berkah, cara syukur, doa. - Muhammad (saw) adalah Nabi terakhir dari Allah. Dia adalah Leader dan Panduan bagi seluruh dunia dan model karakter moral terbaik. - Wahyu dari Al-Qur'an. - Terjemahan dari tasmiah, takbir, kalimah Tayibah	- Adab kepada orang tua, orang tua, guru. - Abad pada Buku dan ilmu. - Kejujuran - Meminta izin untuk masuk. - Bersyukur. - Pemaaf	Masa kecil Nabi Muhammad Saw.

³¹ Ministry of Education Government of Pakistan, *National Education Policy 2017-2025*.

³² Ministry of Education Government of Pakistan, *National ..*

³³ linknya: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149679_eng. Adapun, untuk muatan kurikulum terbaru dapat diakses pada buku teks dapat diakses pada link berikut ini: https://pctb.punjab.gov.pk/download_books, hanya saja semuanya berbahasa Urdu sehingga penulis mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya.

Kelas	Aspek Al-Qur'an	Aspek Aqidah dan Ibadah	Aspek Akhlak	Aspek Tarikh
		dan darus sharif		
III	- Prinsip-prinsip dasar dari al-Quran (hukum bacaan). - Mengulang hafalan dari QS al-Fatehah - Menghafal al-'Ashr, al-Kausar, al-Lahab dan al-Ikhlash.	- Empat nama Malaikat menonjol dan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. - Adab waktu membaca Al Quran. - Shalat, Adab, orientasi dan niat. - Menerjemahkan Tauz, tasbih, tahmid, dan Nabi Adam a.s	- Hubungan dengan kerabat, sahabat dan tetangga. - Meminta izin untuk menggunakan sesuatu. - Meninggalkan sifat berbohong, mencuri, memfitnah. - Adab berbicara.	- Biografi Nabi Saw sampai menerima Wahyu. - Kejujuran dan kebenaran Nabi Suci Saw, Cara beliau berdagang dan kahalalan. - Nabi Saw sebagai suri tauladan.
IV	- Membaca al-Qur'an - Menghafal – Aya al-Kursi, al-Mirasa, al-Quraisy, A-Nasr. - Menghafal dan menerjemahkan QS al-Ikhlash	- Bahwa Allah mencintai kebenaran dan kebajikan. - Manfaat Shalat. - Kesucian al-Qur'an - Kenabian Nuh a.s - Kesucian keluarga Nabi Saw dan keturunannya	- Kejujuran, kesederhanaan, ketepatan waktu dalam doa, membantu orang-orang spesial. - Cinta untuk Pakistan. - Penggunaan sumber daya dengan prinsip menjaga berkelanjutan	- Peristiwa yang terjadi dari awal kenabian sampai hijrah
V	- Membaca al-Qur'an - Menghafal QS Al-Ma'una, Al-Kafirun, Al-Falq, An-Naas. - Menghafal dan menerjemahkan QS. Al-Fatihah, Kalimah Syahadat, Surah al-Kausar dan Al-Asr.	- Kehidupan akhirat. - Menaati Nabi Saw dan Allah Swt - Pentingnya Sejarah Nabi Saw - Nabi a.s Ibrahim a.s Musa a.s, Isa a.s - Shalat Jumat dan Shalat Hari Raya - Pentingnya Puasa	- Menepati janji. - Toleransi, kebaikan dan Pemaaf. - Persaudaraan Islam dan kesetaraan. - Pesatuan nasional. - Cinta untuk Pakistan dan warganya	- Persaudaraan. - Perang Badar, Uhud, Ahzab. - Gencatan Senjata dari Hudaibiya. - Penaklukan Makkah. - Ibadah haji terakhir - Wafatnya Nabi Saw.

Di atas penulis lampirkan berupa muatan pelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) untuk jenjang Sekolah Dasar di Pakistan. Dari lampiran tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa capaian dari pelajaran PAI atau Islamiyat, antara lain:

- Aspek al-Qur'an: Adanya ketuntasan belajar al-Qur'an dari menghafal (mengenal), tanda baca, sampai persoalan tajwid. Kemudian, diikuti dengan menghafal dan menerjemahkannya asmaul husna, 2 kalimat syahadah, serta surah-surah pendek baik dihafal dan diterjemahkan.
- Aspek Aqidah dan Ibadah: Aqidah: muatannya adalah 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah Swt, kitab-Nya, malaikatnya-Nya, rasul-Nya, kehidupan akhirat. Namun, tidak berbicara tentang qada dan qadar. Sedangkan, Ibadah/Fiqh:

perosalanAdab dan Taharat (wudhu), tasmiah, takbir, kalimah Tayibah adab membaca Al-Quran, shalat, adab, orientasi dan niat, manfaat shalat, shalat jumat dan shalat Hari Raya, serta pentingnya puasa. Sedangkan persoalan zakat dan haji tidak dimuat (disinggung), Namun, ibadah haji terkahir Nabi Saw dalam hal ini nanti dimuat pada aspek tarikh (sejarah).

- Aspek Akhlak: Muatan yang ditanam adalah akhlak dan adab (Bangun pagi, membaca kalimah Tayyebah, Islam salam (salaam), adab makan dan minum, kepada orang tua, orang tua, guru, buku dan ilmu, kejujuran, meminta izin untuk masuk, bersyukur, pemaaf, hubungan dengan kerabat, sahabat dan tetangga, meminta izin untuk menggunakan sesuatu, meninggalkan sifat berbohong, mencuri, memfitnah, adab berbicara, kejujuran, kesederhanaan, ketepatan waktu dalam doa, membantu orang-orang special, cinta untuk Pakistan, Penggunaan sumber daya dengan prinsip menjaga berkelanjutan, menepati janji, toleransi, kebaikan dan pemaaf, persaudaraan Islam dan kesetaraan, pesatuan nasional, cinta untuk Pakistan dan warganya
- Aspek Tarikh: Sejarah Nabi Muhammad Saw (nama ayah dan yang menjaganya) Masa kecil Nabi Muhammad Saw, peristiwa yang terjadi dari awal kenabian sampai hijrah, persaudaraan, perang badar, uhud, ahzab, gencatan senjata dari hudaibiya, penaklukan Mekkah, Ibadah haji terakhir dan wafatnya Nabi Saw.

C. Kesimpulan

Terbentuknya negara Islam Pakistan merupakan hasil perjuangan yang cukup panjang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perseteruan antara tiga kekuatan sosial, yaitu Hindu yang menjadi mayoritas di India, kaum muslimin India yang minoritas dan Inggris sebagai penjajah dengan kekuatan politik dan teknologi modern yang dimilikinya. Secara akar permasalahannya, perjuangan tersebut atas semangat Muslim melalui Liga Muslim India, Muhammad Ali Jinnah menyampaikan teori “dua bangsa” dan secara resmi menyampaikan tuntutan sebuah tanah air Muslim yang terpisah dari India. Dalam resolusi tahun 1940, Liga Muslim menyampaikan pembentukan negara Pakistan merdeka dan berdaulat penuh. Dengan berbagai perjuangan yang dilakukannya tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan lahir sebagai negara berdaulat penuh untuk umat Islam India.

Melihat fakta usia kemerdekaannya yang sudah 72 tahun (15 Agustus 1947), seharusnya Pakistan dari segi pembangunan ekonomi yang nantinya mempengaruhi sektor lainnya harus disikapi dengan serius. Setidaknya mereka dapat belajar dari Bangladesh yang baru berusia 48 tahun (sejak 1971) dalam persoalan pembangunan ekonomi. Kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia terkait wajib belajar 9 tahun telah dijadikan sebagai kebijakan pendidikan nasional. Sementara lembaga pendidikannya juga sama yaitu ada lembaga pendidikan umum dan Agama/Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan.

Adapun PAI (Islamiyat / *Islamic Study* nama di Pakistan) dijadikan sebagai sebuah mata pelajaran dimulai dari kelas III sekolah Dasar, sedangkan di Indonesia sudah dapat kita temukan mulai kelas I. Di Pakistan sendiri sebenarnya sudah di mulai dari jenjang pendidikan anak usia *for Early Childhood Education (ECE) and classes I to II, it will be integrated in other subjects, including Urdu text book.*” Selanjutnya, dilihat dari muatan PAI dapat disimpulkan bahwa muatan di dalamnya juga sama dengan PAI di Indonesia. Bahkan, lebih jauh PAI di Pakistan dalam aspek akhlak termuat nilai-nilai kebangsaan (cinta tanah air dan warganya). Kemudian dilihat dari kelembagaan pendidikan Islam, maka terdapat tiga kategori, yaitu: (1) *Quranic School*, (2) *Mosque Primary School*, dan (3) *Madrasah*. Kurikulum di Pakistan juga memiliki karakteristik tersendiri, seperti menghafal al-Qur'an sebelum melanjutkan materi-materi pelajaran lain.

Terakhir, penulis merekomendasikan bagi penulis ataupun peneliti lainnya untuk melakukan kajian atau penelitian tentang pendidikan Islam di berbagai negara Islam lainnya. Kajian penyelenggaraan pendidikan di negara-negara Islam lainnya akan lebih baik juga disampaikan dari sisi implementasi kurikulum pendidikan agama Islam, baik dilihat dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses kurikulum dan evaluasi kurikulum.

D. Daftar Rujukan

- Ahmad, Mumtaz. “Pakistan” dalam John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Aisyah, *Nasionalisme dan Pembentukan Negara Islam Pakistan*, Jurnal Politik Profetik, Vo. 4, No. 2, Makassar: UIN Alauddin, 2014.

- Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam MeLacak Akar-Akar Sejarah Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amin Valliani, *Teaching Islamiyat*, akses <http://www.dawn.com>, pada tanggal 23 Maret 2019.
- B. Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid. XII, Cet. I; Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/> akses tanggal 15Maret 2019.
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>. Diakses tanggal 11 Maret 2019.
- <http://unesco.org.pk/education/teachereducation/lessonplan.html>.
- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149679_eng
- Ida Mustofa, *Relasi Islam dan Kekuasaan dalam Konteks Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal: Urwatul Wutsqo, Vol. 4, No.2 Nganjutk: STAI Darussalam, 2015.
- John L. Esposito, *Islam And Development Religion and Sosiopolitical Change*, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Develepment Ekonomi Pembangunan*, Terj.Haris Munandar dan Puji A.L, Jakarta Erlangga, 2006.
- Ministry of Education Government of Pakistan, *National Education Policy 2017-2025*.
- Ministry of Education Government of Pakistan: *National Education Policy 2009*.
- Mu'ammarr Zayn Qadafy, *Peradaban Islam di India-Pakistan*, Jurnal: Al MURABBI, Vo. 01, No. 02, Ngawi: STIT Islamiyah, 2014.
- Muhammad Nasir, *Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia*, Jurnal: Nadw, Vol. 9, Nomor 2, Samarinda: IAIN Samarinda, 2015.
- Muhammad Qasim (Sekretaris Umum MSM), *Merevolusi Sistem Pendidikan*, <http://shafiyatul.com/news/2016/04/15/merevolusi-sistem-pendidikan/>, akses tanggal 14Maret 2019.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Cet. Ke-7, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Surawardi, *Pendidikan Islam di Pakistan*, Jurnal: Manajemen of Education, Vo. I, Banjarmasin: Manajemen Pendidikan Islam, 2015.

Taufik Adnan Amal, "*Pelajaran Berharga dari Pakistan*", dalam Islam Liberal Com, tanggal 12 Maret 2019, [http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran berharga dari Pakistan](http://Islamlib.com/id/artikel/pelajaran_berharga_dari_Pakistan).